

FEMINISME
DAN PENELITIAN SASTRA
FEMINIS

FEMINISME DAN PENELITIAN
SASTRA FEMINIS

© Wiyatmi, Else Liliani, Esti Swatika Sari, 2021

Penyelaras Aksara : Sadani
Desain Isi & Kover : Mawai
Ilustrasi Kover : Undave Lab

Diterbitkan oleh Cantrik Pustaka
✉ redaksi@cantrikpustaka.com
☎ 0812-1344-3842

Perpustakaan Nasional:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Feminisme dan penelitian sastra feminis /
Wiyatmi, Else Liliani, Esti Swatika Sari
—Yogyakarta: 2021
155 hlm; 14 x 20 cm

Cetakan 1, November 2021
ISBN 978-623-6063-30-9

Buku ini merupakan **edisi komunitas** yang diterbitkan secara mandiri didukung kualitas gagasan bermutu dan dibutuhkan pembaca



Cantrik Pustaka

FEMINISME DAN PENELITIAN SASTRA FEMINIS

Prof. Dr. Wiyatmi, M.Hum.
Dr. Else Liliani, M.Hum.
Esti Swatika Sari, M.Hum.

Cantrik

KATA PENGANTAR



Buku berjudul *Feminisme dan Penelitian Sastra Feminis* ini disusun sebagai salah satu buku yang diharapkan dapat membantu para calon peneliti sastra yang akan menggunakan perspektif feminis. Sebelum sampai pada uraian tentang penelitian sastra feminis dan contoh aplikasinya, diuraikan terlebih dulu pengertian feminisme, sejarah, dan ragam feminisme, termasuk yang berkembang di Indonesia.

Buku ini disusun sebagai salah satu luaran produk penelitian dasar yang didanai oleh Kemenristek/BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia) tahun 2021. Dengan tersusunnya buku ini ucapan terima kasih disampaikan kepada Kemenristek/BRIN yang telah memberikan dana hibah penelitian kepada kami, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan penelitian, dan para reviewer yang telah memberikan saran dan masukannya demi kesempurnaan penelitian yang kami lakukan.

Yogyakarta, 20 Agustus 2021

DAFTAR ISI



Kata Pengantar — 5

Daftar Isi — 7

Bab I / Pendahuluan — 9

Bab II / Feminisme — 13

2.1 Pengertian Feminisme — 13

2.2 Sejarah Feminisme — 15

2.2.1 Feminisme di Eropa dan Amerika — 15

2.2.2 Feminisme di Indonesia — 19

2.3 Ragam Feminisme — 22

Bab III / Penelitian Sastra Feminis — 33

3.1. Konsep Dasar Penelitian Sastra Feminis — 33

3.2 Metode dalam Penelitian Sastra Feminis — 36

3.3 Mempersiapkan Penelitian Sastra Feminis — 39

3.4 Contoh Proposal Penelitian Sastra Feminis — 42

3.5 Contoh Artikel Hasil Penelitian Sastra Feminis — 68

3.5.1 Melacak jejak Kesadaran Feminisme dan
Maninisme dalam Novel Indonesia — 68

3.5.2 Dekonstruksi Sistem Patriarki dan Pencarian Identitas
Novelis Perempuan Indonesia Tahun 2000-an — 85

- 3.5.3 Konstruksi Gender dalam Novel-Novel Anak
Karya Penulis Anak — **104**
- 3.5.4 Peran Perempuan di Sektor Publik Pada Masa
Prakemerdekaan dalam Novel Indonesia:
Studi Kasus Novel *Manusia Bebas* dan *Burung-Burung
Manyar*: Analisis Kritik Sastra Feminis — **125**
- 3.5.5 Para Bidadari dalam Folklor Indonesia dalam
Perspektif Kritik Sastra Feminis — **136**

Daftar Pustaka — 150

BAB I

PENDAHULUAN



Apakah feminisme? Siapakah yang harus memahami feminisme? Masih relevankah feminisme dibahas saat ini, Ketika para perempuan sudah menempuh Pendidikan, bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi? Sejumlah pertanyaan tersebut mungkin segera muncul pada sebagian pembaca Ketika membaca judul buku ini. Berbagai jawaban dapat saja diberikan. Mulai dari jawaban yang mungkin menganggap tidak lagi relevan membahas feminisme pada saat ini, sampai jawaban yang menganggap masih perlu memahami dan merevisi pemahaman mengenai feminisme.

Ketika pembaca merasa tidak relevan lagi membahas feminisme pada saat ini karena faktanya para perempuan sudah banyak yang mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan tinggi, dapat dikejar pertanyaan selanjutnya: apakah feminisme hanya melulu bicara soal kesempatan menempuh pendidikan bagi kaum perempuan? Bagaimana dengan marginalisasi perempuan dalam pemberitaan di media massa? Bagaimana dengan kekerasan terhadap perempuan di dunia kerja, bahkan juga di dalam keluarga?

Catatan Tahun 2020 Komnas Anti-Kekerasan terhadap Perempuan yang dirilis 6 Maret 2020, membeberkan fakta bahwa (1) ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri atas 421.752 kasus yang bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama; (2) ada 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra penyedia layanan yang tersebar di sepertiga provinsi di Indonesia; dan (3) ada 1419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun menelpon ke Komnas Perempuan. Dari 1.419 pengaduan tersebut, 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasis gender 142. Artinya, di sekitar kita masih banyak kaum perempuan yang tidak aman dan perlu diselamatkan. Lantas, apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita sumbangkan sebagai ilmuwan sastra dalam menghadapi hal tersebut? Apakah sebagai ilmuwan sastra kita hanya akan menjadi penonton pasif? Tentu saja tidak.

Seorang ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial yang dipikul di bahunya. Fungsi ilmuwan tidak berhenti pada penelaahan dan keilmuan secara individu, namun juga ikut bertanggung jawab agar produk keilmuan sampai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (Suriasumantri, 2001: 237). Dengan kemampuan pengetahuannya seorang ilmuwan harus mampu memengaruhi opini masyarakat terhadap masalah-masalah yang seyogyanya mereka sadari (Suriasumantri, 2001: 241). Sebelumnya, Francis Bacon (1561-1626), seorang filsuf dari Inggris juga telah mengemukakan berbagai macam permasalahan hidup manusia harus diatasi dengan mengembangkan ilmu pengetahuan (Prasetyono, 2013: 189). Sebagai salah satu ilmu humaniora, ilmu sastra juga harus berperan

dalam mengatasi berbagai macam permasalahan hidup manusia, termasuk masalah ketidakadilan gender dan degradasi lingkungan hidup. Dengan kemampuan pengetahuannya yang diperoleh melalui proses penelaahan ilmiah, ilmuwan sastra diharapkan mampu menempatkan masalah yang dihadapi masyarakat pada proporsi yang sebenarnya, memberikan perspektif yang benar: untung ruginya, baik buruknya, sehingga penyelesaian yang objektif dapat dimungkinkan (Surjasumantri, 2001: 240-241).

Melalui penelitian sastra feminis, sebagai ilmuwan sastra kita dapat ikut berperan dalam upaya menanamkan kesadaran feminisme, kesadaran yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender, kesadaran yang tidak menganggap perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah dari laki-laki. Dalam ilmu sastra, dikenal kajian atau kritik sastra feminis, yaitu sebuah cara membaca dan mengkaji fenomena sastra yang berperspektif feminis. Bagaimana cara kerja kajian sastra feminis? Apa landasan berpikirnya? Itulah sejumlah pertanyaan yang akan dijawab melalui buku ini. Selain menyajikan kerangka konseptual feminisme dan kajian sastra feminis, buku ini juga dilengkapi dengan beberapa contoh kajian sastra feminis.

Buku ini ditulis sebagai panduan bagi para mahasiswa ilmu sastra yang akan memahami konsep dasar penelitian sastra feminis dan cara kerjanya. Sistematika buku meliputi pengertian feminisme dan sejarah gerakan feminisme di Eropa, Amerika, dan Indonesia, ragam feminisme, penelitian sastra feminis, dan beberapa contoh kajian sastra feminis.

BAB II

FEMINISME



2.1 Pengertian Feminisme

Feminisme merupakan salah satu aliran pemikiran dalam ilmu sosial humaniora yang mencoba memahami mengapa di dalam masyarakat terjadi ketidakadilan gender, apa yang menyebabkan, dan apa akibat yang ditimbulkannya. Secara sederhana feminisme ialah suatu gerakan atau ideologi yang memperjuangkan kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam bidang pendidikan, pekerjaan, akses sosial-politik dan lain-lain (Ilyas, 1998: 40).

Bhasih & Khan (1998: 1) menyatakan bahwa feminisme adalah suatu kesadaran akan adanya penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Sering kali orang salah kaprah memahami feminisme. Sebagian besar orang yang belum paham menganggap bahwa pemikiran dan gerakan feminisme hanya dimiliki dan dilakukan perempuan. Pernyataan Bhasin &

Khan jelas menunjukkan bahwa melalui feminisme perempuan maupun laki-laki secara sadar menginginkan adanya perubahan dari kondisi yang ditandai oleh dominasi laki-laki dan merugikan perempuan, menjadi kondisi yang bebas dari dominasi.

Feminisme sering dipahami sebagai ideologi dan gerakan pembebasan perempuan dari ketidakadilan yang disebabkan oleh sistem patriarki. Dalam Kata Pengantar bukunya yang berjudul *Feminist Thought*, Tong (2006: 2) mengingatkan bahwa feminisme bukanlah ideologi yang monolitik, feminisme tidak berpikiran sama. Feminisme mempunyai masa lalu, masa kini, dan masa depan. Untuk menggambarkan adanya perbedaan pemikiran feminisme, Tong (2006) membedakan feminisme menjadi feminisme liberal, feminisme radikal (yang dibedakan lagi menjadi radikal libertarian dan radikal kultural), feminisme marxis dan sosialoi, feminisme psikoanalisis dan gender, feminisme eksistensialis, feminisme postmodern, feminisme multikultural dan global, dan ekofeminisme. Meskipun feminisme memiliki banyak aliran, namun memiliki asumsi yang sama tentang sistem patriarki. Asumsi feminisme tentang ideologi patriarki adalah negatif, karena di mana ideologi telah menempatkan perempuan pada posisi subordinat, di bawah posisi pria (Megawangi, 1996: 1). Penolakan para feminis pada sistem patriarki inilah yang telah mewarnai gerakannya, yaitu ingin meruntuhkan struktur patriarki agar tercapai sistem yang lebih egaliter (Megawangi, 1996: 1).

Dari beragam pemikiran feminisme tersebut, Humm (2007: 157-158) mendefinisikan feminisme sebagai ideologi pembebasan perempuan, dengan keyakinan bahwa sebelumnya perempuan telah mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya. Dalam hal ini feminisme menggabungkan doktrin persamaan hak

bagi perempuan yang menjadi gerakan yang terorganisasi untuk mencapai hak asasi perempuan dengan sebuah ideologi transformasi sosial yang bertujuan untuk menciptakan dunia bagi perempuan. Feminisme menawarkan berbagai analisis mengenai penyebab, pelaku dari penindasan perempuan (Humm, 2007: 1578). Sementara itu, Ruthven (1985: 6) menyatakan bahwa feminisme lahir untuk mengakhiri dominasi laki-laki. Melalui proyek feminisme harus dihancurkan struktur budaya, seni, gereja, hukum, keluarga inti yang berdasarkan pada kekuasaan ayah dan negara, juga semua citra, institusi, adat istiadat, dan kebiasaan yang menjadikan perempuan sebagai korban yang tidak dihargai dan tidak tampak (Ruthven, 1985: 6).

Dari pendapat Humm dan Ruthven tampak bahwa pada dasarnya feminisme hadir berposisi dengan ketidakadilan yang diakibatkan oleh sistem patriarki yang menganggap bahwa laki-laki memiliki kedudukan istimewa dari pada perempuan. Hal ini sesuai dengan konsep patriarki menurut Walby (1990), yaitu sebuah sistem struktur sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi yang senantiasa mendominasi dan mengeksploitasi perempuan.

2.2 Sejarah Feminisme

2.2.1 Feminisme di Eropa dan Amerika

Lahirnya pemikiran dan gerakan feminisme di Eropa dan Amerika abad ke-18 diawali dengan gagasan tentang pentingnya kesetaraan pendidikan antara perempuan dengan laki-laki yang dikemukakan oleh Mary Wollstonecraft melalui bukunya yang *Vindication of the Right of Woman* (Tong, 2006: 18 -22). Gagasan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi Eropa abad ke-18, ketika kaum perempuan borjuis dan kelas menengah yang sudah

menikah harus tinggal di rumah dan menjadi “peliharaan” yang mengorbankan kesehatan, kebebasan, dan moralitasnya untuk prestise, kenikmatan, dan kekuasaan suaminya. Mereka juga dihambat untuk mengembangkan kemampuan nalarnya, dengan alasan hal terbaik yang dapat dilakukan adalah memanjakan diri dan menyenangkan orang lain, terutama laki-laki dan anak-anaknya (Tong, 2006: 18-19). Lirik lagu ciptaan Ismail Marzuki “Sabda Alam” yang dinyanyikan Titiek Puspa 1970-1980-an; *diciptakan alam pria dan wanita/dua makhluk dalam asuhan dewata/ ditakdirkan bahwa pria berkuasa/adapun wanita lemah lembut manja/ wanita dijajah pria sejak dulu/dijadikan perhiasan sangkar madu/namun ada kala pria tak berdaya/ tekuk lutut di sudut kerling wanita* adalah gambaran yang sesuai dengan keadaan perempuan kelas menengah dan atas di Eropa abad ke-18.

Wollstonecraft kemudian mendorong agar perempuan menjadi manusia seutuhnya (*personhood*) yang memiliki kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Salah satu jalan yang harus ditempuh adalah melalui pendidikan. Masyarakat wajib memberikan pendidikan yang setara kepada perempuan setara dengan laki-laki (Tong, 2006: 21). Kurang lebih seratus tahun kemudian, gagasan Wollstonecraft, didukung oleh John Stuart Mill dan Harriet Taylor yang menerbitkan *Early Essay on Marriage and Divorce* (1832), dilanjutkan dengan tulisan Taylor *Enfranchisement of Women* dan Mills *The Subjection of Women* (1851). Taylor dan Mills menyatakan bahwa kemampuan intelektual laki-laki dan perempuan sama, sehingga kalau terjadi perbedaan pencapaian intelektual adalah semata-mata hasil pendidikan laki-laki yang lebih lengkap daripada perempuan (Tong, 2006: 28). Taylor dan Mills juga menekankan bahwa perempuan harus memiliki hak

pilih agar dapat setara dengan laki-laki dan diakui hak politiknya (Tong, 2006: 30).

Selanjutnya, di Amerika, gelombang pertama ini ditandai dengan adanya Konvensi Hak-hak Perempuan yang diadakan di Seneca Falls, New York pada 1848. Pertemuan tersebut diprakarsai oleh Elizabeth Cady Stanton dan dihadiri oleh 300 perempuan dan laki-laki (Madsen, 2000: 3-7; Tong, 2006: 31). Pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan sikap (*Declaration of sentiments*) dan dua belas resolusi. Deklarasi pernyataan sikap tersebut menekankan isu yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Mill dan Taylor di Inggris, terutama berhubungan dengan kebutuhan untuk mereformasi hukum perkawinan, perceraian, hak milik, dan pengasuhan anak (Madsen, 2000: 6; Tong, 2006: 31). Kedua belas resolusi menekankan pada hak-hak perempuan untuk mengutarakan pendapatnya di depan umum (Tong, 2006: 32).

Setelah pertemuan di Seneca Falls pada 1848 Susan B. Anthony dan Elizabeth Cady Stanton mendirikan National Woman's Suffrage Association (Asosiasi Gerakan Hak Pilih Perempuan Nasional), disusul dengan Lucy Stone yang mendirikan American Woman's Suffrage Association (Asosiasi Gerakan Hak Pilih Perempuan Amerika) untuk mengembangkan amandemen hak pilih untuk konstitusi (Madsen, 2000: 6; Tong, 2006: 33). Dua asosiasi tersebut memiliki perbedaan filosofis. Lucy Stone lebih menekankan pada peran agama yang terorganisasi dalam terhadap perempuan yang tidak diperhatikan oleh Anthony dan Stanton. Dengan berdirinya kedua asosiasi tersebut, gerakan hak-hak perempuan Amerika terpecah menjadi dua (Tong, 2006: 33). Perbedaan lain dari kedua asosiasi tersebut menurut Tong (2006: 33–34) adalah bahwa National Woman's Suffrage Association menyampaikan agenda

feminis yang revolusioner dan radikal, sementara American Woman's Suffrage Association mendorong agenda feminis yang reformis dan liberal. Kedua asosiasi tersebut kemudian bersatu pada 1890 dan membentuk National American Women's Suffrage Association menjadi gerakan perempuan untuk memperoleh hak pilih. Mereka percaya bahwa hanya dengan mendapatkan hak pilih perempuan telah sungguh-sungguh setara dengan laki-laki (Tong, 2006: 33 -34).

Setelah mendapatkan hak pilih, mereka tidak menunjukkan aktivitas yang berarti di Amerika selama hampir empat puluh tahun. Baru pada 1960 muncul generasi baru feminis yang dikenal dengan feminisme gelombang kedua. Feminisme Amerika gelombang kedua ditandai dengan berdirinya beberapa kelompok hak-hak perempuan, yaitu *National Organization for Women [NOW]*, *the National Women's Political Caucus [NWPC]*, dan *the Women's Equity Action League [WEAL]*. Tujuan utama dari organisasi tersebut adalah untuk meningkatkan status perempuan dengan menerapkan tekanan legal, sosial, dan lain-lain terhadap berbagai lembaga mulai dari Bell Telephone Company hingga jaringan televisi dan partai-partai politik utama (Tong, 2006: 34). Kelompok-kelompok tersebut lebih dikenal dengan sebutan Kelompok Pembebasan Perempuan (Tong, 2006: 34) atau Gerakan Pembebasan Perempuan (*Women's Liberation Movement (WLM)*) (Humm, 1992: 3) dengan tujuan meningkatkan kesadaran perempuan mengenai opresi terhadap perempuan. Beberapa tokoh feminis gelombang kedua antara lain adalah Betty Friedan, dengan karyanya *The Feminine Mystique* (1977), Shulamith Firestone, dengan karyanya *The Dialectic of Sex*, Kate Millett, dengan karyanya *Sexual Politics*, dan Gloria Steinem, dengan karyanya *Outrageous*

Acts and Everyday Rebellions (Madsen, 2000: 2; Humm, 1992: 4). Perkembangan feminisme Amerika gelombang kedua selanjutnya ditandai oleh kritik terhadap arus *white feminism* (feminisme kulit putih) yang dilakukan oleh Angela Davis melalui *Woman, Race, and Class* (1981) dan *Ain't I a Woman?* (1981), serta feminis lesbian seperti Adrienne Rich dan Audre Lorde (Madsen, 2000: 2).

Selanjutnya, muncullah feminisme gelombang ketiga yang lebih dikenal dengan feminisme postmodern atau feminisme Perancis yang dipengaruhi oleh pemikiran postmodernisme yang dikembangkan oleh para feminis berkebangsaan Perancis (Tong, 2000: 284; Arivia, 2003: 127). Di samping itu juga dikenal feminisme poskolonial (Lewis & Mills, 1991) atau sering kali juga dikenal sebagai feminisme dunia ketiga (*third world feminism*) (Sandoval dalam Lewis & Mills, ed., 1991).

Beberapa feminis postmodern, seperti Cixous misalnya, menolak menggunakan istilah feminis dan lesbian karena menurutnya kata-kata tersebut bersifat parasit dan menempel pada pemikiran falogosentrisme. Menurutnya, kedua kata tersebut berkonotasi penyimpangan dari suatu norma dan bukannya merupakan pilihan seksual yang bebas atau sebuah ruang untuk solidaritas perempuan (Tong, 2006: 284). Beberapa tokoh penting feminisme gelombang ketiga ini adalah Helene Cixous, Luce Irigaray, dan Julia Kristeva (Tong, 2006: 284).

2.2.2 Feminisme di Indonesia

Kemunculan dan perkembangan feminisme di Indonesia berbeda dengan yang terjadi di Eropa dan Amerika. Hal ini karena, sebelum Kartini yang dapat dikatakan mendapat pengaruh dari feminisme Eropa (Belanda) dari buku dan majalah yang dibacanya,

serta persahabatannya dengan sejumlah tokoh di Belanda, sejumlah tokoh perempuan di Indonesia di era prakemerdekaan telah ikut berjuang melawan kolonialisme. Dalam *Seratus Tahun Feminisme di Indonesia*, Arivia & Subono (2017: 7) menyatakan bahwa feminisme di Indonesia telah ada sejumlah tokoh perempuan yang ikut berperan dalam melawan kolonialisme, yaitu Cut Nyak Dien dan Cut Meutia dari Aceh; Roro Gusik dan suaminya Untung Suropati yang memberontak di Jawa; Martha Christina Tiahahu yang menjadi bagian dari revolusi yang dipimpin Pattimura di Maluku; dan juga Emmy Saelan yang sangat aktif di balik pemberontakan pimpinan Wolter Monginsidi di Sulawesi Selatan (Saskia via Arivia & Subono (2017: 7).

Selain itu, Arivia & Subono (2017: 9) juga menyebutkan adanya beberapa tokoh perempuan yang sangat menonjol dalam memperjuangkan kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Selain Kartini (1879-1904) yang mengemukakan gagasan emansipasi perempuan melalui surat-surat yang ditulisnya untuk teman-temannya yang berkebangsaan Belanda (seperti Ny. Abendanon, Stella, Ny. Ovink-Soer, dll), yang kemudian dibukukan dengan judul *Door Duisternis Tot Licht* (1911), juga ditemukan sejumlah tokoh yang berjuang di bidang Pendidikan, yaitu Maria Walanda Maramis (1827-1924) dari Sulawesi Utara, Dewi Sartika (1884-1947) dari Jawa Barat, dan Nyi H. Ahmad Dahlan dari Yogyakarta. Selain itu, (Stuers, 2008: 71-103) juga mencatat nama-nama lainnya, yaitu Roehana Koeddoes (Sekolah Kerajinan Amai Setia di Koto Gadang, Sumatra Barat, 1911), Rahmah El Junusiah (Madrasah Diniyah Putri di Padang Panjang, 1923), dan Nyi H. Ahmad Dahlan yang mendirikan Aisyiyah (sekolah-sekolah kejuruan untuk kaum perempuan di Yogyakarta (1955).

Peristiwa sejarah gerakan feminisme di Indonesia adalah diselenggarakannya Kongres Perempuan Pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta 22 Desember 1928 dan dihadiri oleh sekitar 1.000 orang, yang terdiri dari perwakilan 23 organisasi perempuan, dengan 15 orang pembicara, juga menunjukkan adanya semangat feminisme yang telah berkembang di era prakemerdekaan Indonesia. Kongres Perempuan tersebut diselenggarakan atas prakarsa Nyonya Soekanto, guru perempuan di sekolah Belanda Pribumi dan anggota Komite Wanita Utomo, seperti Nyi Hadjar Dewantara dan Soejatin, guru Perguruan Taman Siswa dan anggota Komite Putri Indonesia (Stuers, 2007: 133; Oetoyo-Habsjah dalam Blackburn, ed. 2007:xi).

Setelah kemerdekaan, semakin banyak organisasi perempuan bermunculan. Namun, yang paling progresif dan memiliki anggota serta simpatisan terbesar adalah Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) (Arivia & Subono, 2017: 11). Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, Gerwani yang dianggap berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, menjadi salah satu organisasi yang dibekukan.

Di masa Orde Baru feminisme di Indonesia dapat dikatakan berada dalam titik terendah. Pemerintah membentuk organisasi perempuan yang beroperasi di desa-desa dengan nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan misi untuk mendukung dan menjalankan pembangunan nasional, terutama menyukseskan program keluarga berencana untuk mengontrol laju kelahiran bayi (Suryakusuma, 2011; Arivia & Subono, 2017: 11). Selain PKK, di instansi pemerintah juga dibentuk Dharma Wanita sebagai asosiasi istri pegawai negeri Republik Indonesia, berpasangan dengan Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia), yang memiliki

struktur hierarki paralel dengan hierarki jabatan suami dan Dharma Pertiwi (asosiasi istri perwira militer)

Feminisme di Indonesia mulai bangkit kembali di era Reformasi, yang ditandai dengan lahirnya Komnas Perempuan (1998), yang posisinya dikuatkan oleh Perpres Nomor 65 Tahun 2005. Komnas perempuan didirikan oleh para feminis, antara lain Prof. Saparinah Sadli (saat itu menjabat sebagai Ketua Kajian Wanita UI), Ita F. Nadia, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Kuraisin Sumhadi, Mayling Oey, Mely G. Tan, Kamala Chandrakirana, dan Smita Notosusanto. Di era Komnas Perempuan inilah dapat dikatakan terdapat agen kebijakan perempuan di pemerintahan/negara atau yang disebut sebagai *state feminism* atau femokrat (Arivia & Subono, 2017: 21). Salah satu yang patut dicatat sebagai demokrat dan berhasil mempromosikan kebijakan-kebijakan yang sensitif gender adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan pada 2005-2010. Selain memperjuangkan penganggaran yang responsif gender, Sri Mulyani menerapkan *affirmative action* untuk mempromosikan perempuan-perempuan di tingkat eselon 1 dan berkeyakinan bahwa penyelenggara negara sudah sepatutnya memiliki perspektif gender agar program pemerintah yang dipromosikan dapat efektif, apalagi bila program-program tersebut untuk menanggulangi kemiskinan (Arivia & Subono, 2017: 21).

2.3. Ragam Feminisme

Mengacu pada pendapat Tong (2006), berdasarkan perkembangan dan fokus pemikiran dan perjuangannya feminisme dibedakan menjadi berbagai ragam, yaitu feminisme liberal, feminisme radikal (yang dibedakan lagi menjadi radikal libertarian dan radikal kultural), feminisme marxis dan sosialis,

feminisme psikoanalisis dan gender, feminisme eksistensialis, feminisme postmodern, feminisme multikultural dan global, dan ekofeminisme. Selain pembagian ragam feminisme tersebut, juga dikenal feminisme poskolonial, seperti dikemukakan oleh Leela Gandhi (1998) dan Reina Lewis and Sara Mills (2003), yang oleh Margaret A. McLaren (2017) disebut sebagai feminisme transnasional.

Sesuai dengan namanya, maka feminisme liberal yang pertama kali digagas oleh Mary Wollstonecraft, dilanjutkan dengan Taylor dan Mills dilandasi oleh cara berpikir liberal yang menganggap semua orang memiliki hak yang sama dalam pendidikan dan berpendapat. Dalam sejarah perkembangannya, feminisme liberal menurut Tong (2006: 16-17) dapat dibedakan menjadi tiga varian, yaitu feminisme liberal klasik (*liberalism*), feminisme liberal kesejahteraan, dan feminisme liberal kontemporer.

Dalam pembahasan mengenai hambatan sikap dan struktural yang menghalangi kemajuan perempuan feminisme liberal klasik yakin bahwa setelah hukum dan kebijakan yang diskriminatif dihilangkan, sejak itu secara formal perempuan dimampukan untuk bersaing secara setara dengan laki-laki. Feminisme liberal yang berorientasi pada kesejahteraan menganggap bahwa masyarakat seharusnya tidak hanya mengompensasi perempuan untuk ketidakadilan di masa lalu, tetapi juga menghilangkan hambatan sosial ekonomi dan juga hambatan hukum bagi kemajuan perempuan kini. Oleh karena itu, Tong (2006: 50) mengemukakan bahwa feminisme liberal kesejahteraan mengadvokasikan bahwa pelamar perempuan pada sekolah-sekolah atau pekerjaan harus dipilih atas pelamar laki-laki selama pelamar perempuan itu dapat melaksanakan pekerjaan secara layak. Feminisme liberal

kontemporer berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang opresif, yaitu dari peran-peran yang digunakan sebagai alasan atau pembenaran untuk memberikan tempat yang lebih rendah, atau tidak memberikan tempat sama sekali bagi perempuan, baik di dalam akademi, forum, maupun pasar (Tong, 2006: 48). Menurut Tong (2006: 49) tujuan tersebut ditekankan karena masyarakat patriarkat mencampuradukkan seks dan gender dan menganggap hanya pekerjaan-pekerjaan yang dihubungkan dengan kepribadian feminin yang layak untuk perempuan.

Feminisme radikal berkembang di Amerika 1960-an yang ditandai oleh para feminis yang bergerak dalam kelompok hak-hak perempuan dan kelompok pembebasan perempuan (Tong, 2006: 67). Mereka yang tergabung dalam kelompok hak-hak perempuan, memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mencapai kesetaraan gender dengan mereformasi sistem dengan menghapuskan kebijakan mereka yang pendidikan, hukum, dan ekonomi yang diskriminatif. Mereka yang tergabung dalam kelompok pembebasan perempuan lebih tertarik pada partisipasi mereka dalam satu atau lebih gerakan sosial radikal di Amerika Serikat pada awal 1960-an memiliki hasrat untuk memperbaiki kondisi perempuan (Tong, 2006: 68).

Feminisme radikal dibedakan menjadi dua, yaitu radikal libertarian dan kultural. Terdapat perbedaan pandangan antara feminisme radikal libertarian dengan feminisme radikal kultural dalam memaknai sistem seks/gender. Feminisme libertarian memandang seks/ gender sebagai rangkaian pengaturan yang digunakan oleh masyarakat untuk mentransformasi seksualitas biologis menjadi produk kegiatan manusia (Tong, 2006: 79).

Beberapa tokoh feminis radikal liberatian memiliki pandangan yang agak berbeda dalam memahami relasi seks/ gender. Menurut Kate Millet (*Sexual Politics*, 1970), seks adalah politik, terutama dalam hubungan laki-laki dengan perempuan yang merupakan paradigma dari hubungan kekuasaan. Untuk mengakhirinya, maka untuk mendapatkan kebebasan sistem patriarki harus dihapuskan. Shulamith Firestone menyatakan bahwa dasar ideologi seksual/ politik yang menyebabkan adanya dominasi laki-laki dan submisi perempuan adalah peran reproduksi. Oleh karena itu, untuk mengakhiri dominasi tersebut, harus diakhiri konsep keluarga biologis. Tidak perlu ada hubungan seksual antara perempuan dengan laki-laki agar peran gender pada tinggal biologis dapat diakhiri (Tong, 2006: 77-78).

Para penganut feminisme radikal kultural memiliki pandangan yang berbeda dengan feminisme radikal libertarian. Marilyn French memandang bahwa pada mulanya manusia hidup dalam harmoni dengan alam. Namun, sejalan dengan pertumbuhan populasi manusia, makanan menjadi langka. Hasrat laki-laki untuk menguasai alam selanjutnya terkombinasi dengan menguasai perempuan, hingga lahirkah patriarki. Untuk menghindari hal tersebut, French menawarkan gagasan bahwa nilai-nilai feminisme harus diintegrasikan ke dalam masyarakat laki-laki yang telah diciptakan oleh ideologi patriarki. French mengajarkan bahwa kita harus menghargai cinta dan kelembutan, serta kemauan untuk saling berbagi dan menjaga kesetaraan (Tong, 2006: 80).

Feminisme Marxis dipengaruhi oleh ideologi kelas Karl Marx. Feminisme Marxis mengidentifikasi kelasisme sebagai penyebab opresi (penindasan) terhadap perempuan (Tong, 2006: 139). Opresi terhadap perempuan tersebut bukanlah hasil tindakan sengaja

dari satu individu, melainkan produk dari struktur politik, sosial, dan ekonomi tempat individu itu hidup (Tong, 2006: 139). Oleh karena itu, tujuan dari feminisme Marxis adalah mendeskripsikan basis material ketertundukan perempuan dan hubungan antara model-model produksi dan status perempuan, serta menerapkan teori perempuan dan kelas pada peran keluarga (Humm, 2007: 270).

Feminisme psikoanalisis dan gender mengemukakan gagasan bahwa penjelasan fundamental atas cara bertindak perempuan berakar dalam psikis perempuan, terutama dalam cara berpikir perempuan (Tong, 2006: 190). Dengan mendasarkan pada konsep Freud, seperti tahapan odipal dan kompleks Oedipus, feminis psikoanalisis mengklaim bahwa ketidaksetaraan gender berakar pada rangkaian pengalaman pada masa kanak-kanak awal mereka. Pengalaman tersebut mengakibatkan bukan saja cara masyarakat memandang dirinya sebagai feminin, melainkan juga cara masyarakat memandang bahwa maskulinitas adalah lebih baik dari femininitas.

Feminisme psikoanalisis timbul untuk mengkritisi teori psikoanalisis Freud, terutama teori perkembangan seksual anak yang berhubungan dengan kompleks Oedipus dan kastrasi (Tong, 2006: 191). Menurut Freud, maskulinitas dan femininitas adalah produk pendewasaan seksual. Jika anak laki-laki berkembang secara normal, mereka akan menjadi laki-laki yang akan menunjukkan sifat-sifat maskulin yang diharapkan, dan jika perempuan berkembang secara normal, maka mereka akan menjadi perempuan dewasa yang menunjukkan sifat-sifat feminin. Menurut Freud, inferioritas perempuan terjadi karena kekurangan anak perempuan akan penis (Tong, 2006: 196). Sebagai konsekuensi jangka panjang dari kecemburuan terhadap penis (penis envy)

dan kompleks Oedipus yang dialaminya, menurut Freud (via Tong, 2006: 195-196), perempuan menjadi narsistis, mengalami kekosongan, dan rasa malu. Perempuan menjadi narsistis ketika ia mengalihkan tujuan seksualnya aktif menjadi pasif, yang termanifestasikan pada keinginan untuk lebih dicintai dari pada mencintai. Semakin cantik seorang anak perempuan, semakin tinggi harapannya untuk dicintai. Karena tidak memiliki penis, anak perempuan menjadi kosong, dan mengompensasikannya pada penampilan fisiknya yang total. Dengan penampilan yang baik secara umum akan menutupi kekurangannya atas penis. Rasa malu dialami anak perempuan karena tanpa penis dia melihat tubuhnya yang terkastrasi.

Teori Freud tersebut telah ditolak oleh para feminis, seperti Betty Friedan, Shulamit Firestone, dan Kate Millett. Mereka berargumen bahwa posisi serta ketidakberdayaan sosial perempuan terhadap laki-laki, kecil hubungannya dengan biologi perempuan, dan sangat berhubungan dengan konstruksi sosial atas feminitas (Tong, 2006: 196). Dalam hal ini Friedan menyalahkan Freud karena telah mendorong perempuan untuk beranggapan bahwa ketidaknyamanan serta ketidakpuasan perempuan berasal dari ketidakadaan penis saja dan bukan karena status sosial ekonomi serta budaya yang menguntungkan laki-laki. Dengan mengisyaratkan kepada perempuan bahwa mereka dapat menggantikan penis dengan bayi, menurut Friedan, Freud telah merayu perempuan untuk masuk ke dalam jebakan mistik feminin. Oleh karena itu, Friedan menyalahkan Freud yang telah menjadikan pengalaman seksual yang sangat spesifik (vaginalisme) sebagai keseluruhan serta akhir dari eksistensi perempuan (Tong, 2006: 197).

Freidan juga mengutuk Freud karena telah mendorong perempuan untuk menjadi reseptif, pasif, bergantung pada orang lain, dan selalu siap untuk mencapai tujuan akhir dari kehidupan seksual mereka, yaitu hamil. Sementara itu, Millett menganggap pandangan Freud bahwa perempuan mengalami kecemburuan terhadap penis merupakan contoh transparan dari egoisme laki-laki (Tong, 2006: 197-198). Firestone juga mengkritik teori Freud yang menganggap pasivitas seksual perempuan sebagai hal yang alamiah. Menurutnya pasivitas seksual perempuan terjadi sebagai hasil konstruksi sosial dari ketergantungan fisik, ekonomi, emosional perempuan pada laki-laki (Tong, 2006: 197). Firestone bahkan menyarankan agar manusia seharusnya menghapuskan keluarga inti, termasuk menghapuskan tabu inses yang merupakan akar penyebab kompleks Oedipus.

Feminisme eksistensialis adalah pemikiran feminisme yang dikembangkan oleh Simone de Beauvoir melalui karyanya *Second Sex* (2003). Dengan mendasarkan pada pandangan filsafat eksistensialisme Beauvoir mengemukakan bahwa laki-laki dinamai laki-laki Sang Diri, sedangkan perempuan Sang Liyan (*the other*). Jika Liyan adalah ancaman bagi Diri, maka perempuan adalah ancaman bagi laki-laki. Oleh karena itu, menurut Beauvoir jika laki-laki ingin tetap bebas, ia harus mensubordinasi perempuan (Beauvoir, 2003: 89; Tong, 2006: 262). Pandangan bahwa perempuan adalah Liyan (*the other*) dalam relasinya dengan laki-laki yang diyakini oleh feminisme eksis-tensialis juga dianut oleh feminisme posmodern (Tong, 2006: 284; Arivia, 2003: 128). Secara luas feminis postmodern seperti Helene Cixous, Luce Irigaray, dan Julia Kristeva mengembangkan gagasan intelektualnya dari filsuf eksistensialis Simone de Beauvoir, dekonstruksionis Jacques

Derrida, dan psikoanalisis Jacques Lacan (Tong, 2006: 284). Seperti Beauvoir, ketiga feminis postmodern ini berfokus pada ke-liyan-an perempuan. Seperti Derrida, ketiganya juga gemar menyerang gagasan umum mengenai kepengarangan, identitas, dan diri. Seperti Lacan, ketiganya mendedikasikan diri untuk menafsirkan kembali pemikiran tradisional Freud yang kemudian merobohkan tafsir-tafsir yang semula dianggap baku (Tong, 2006: 284).

Feminisme multikultural dan global berhubungan dengan pemikiran multikultural, yaitu suatu ideologi yang mendukung keberagaman (Tong, 2006: 310). Sebagai pemikiran feminisme yang mendukung keberagaman, feminisme multikultural menghargai perbedaan dari para pemikir multikultural dan menyayangkan bahwa teori feminis sebelumnya yang sering kali gagal membedakan antara kondisi perempuan kulit putih, kelas menengah, heteroseksual, Kristen yang tinggal di negara yang maju dan kaya, dengan kondisi yang sangat berbeda dari perempuan lain yang mempunyai latar belakang yang berbeda (Tong, 2006: 310).

Feminisme multikultural melihat bahwa penindasan terhadap perempuan tidak dapat hanya dijelaskan lewat patriarkat, tetapi ada keterhubungan masalah dengan ras etnisitas, dan sebagainya. Sementara itu, dalam feminisme global bukan hanya ras dan etnisitas yang berhubungan dengan penindasan terhadap perempuan, tetapi juga hasil dari kolonialisme dan dikotomi dunia pertama dan dunia ketiga (Tong, 2006: 315; Arivia, 2003: 154). Beberapa tokoh feminis multikultural dan global antara lain adalah AudreLorde, Alice Walker, Angela Davis, Charlotte Bunch, Susan Brondo, Maria Mies (Arivia, 2003: 154). Kelompok feminis ini sering kali juga disebut sebagai feminis poskolonial atau feminis dunia ketiga (Lewis & Mills, 2003).

Menurut Gandhi (1998: 83), feminisme poskolonial yang merupakan aliansi antara teori poskolonial dan feminisme berusaha memukul balik hierarki gender/budaya/ras yang telah ada dan menolak oposisi biner terhadap konstruk wewenang patriarkat/kolonialisme sendiri. Para penganut teori feminisme poskolonial telah memberikan alasan yang kuat bahwa persoalan pusat politik rasial telah menenggelamkan kolonisasi ganda kaum perempuan di bawah kekuasaan imperialisme.

Feminis poskolonial merumuskan bahwa perempuan dunia ketiga merupakan korban *par excellence* atau korban yang terlupakan dari dua ideologi imperialisme dan patriarkat asing (Gandhi, 1998: 83). Dengan perspektif feminisme poskolonial, melalui artikelnya "Can the Subaltern Speak?" Spivak (1988: 306) memahami posisi perempuan sebagai anggota kelompok subaltern. Dia mengemukakan bahwa dalam wacana feminisme poskolonial, sebagai kelompok subaltern perempuan dunia ketiga menghilang karena kita tidak pernah mendengar mereka berbicara tentang dirinya (Spivak, 1988: 306; Gandhi, 1998: 87-89).

Ekofeminisme adalah pemikiran feminisme yang ingin memberi pemahaman adanya hubungan antara segala bentuk penindasan manusia dengan alam dan memperlihatkan keterlibatan perempuan dalam seluruh ekosistem (Tong, 2006: 359; Arivia, 2003: 154). Seperti dikemukakan oleh Tong (2006: 350), karena perempuan secara kultural dikaitkan dengan alam, ekofeminisme berpendapat ada hubungan simbolik dan linguistik antara feminis dan isu ekologi. Ekofeminisme pada dasarnya adalah varian yang relatif baru dari etika ekologis. Istilah ini, menurut Tong (2006: 366) muncul pertama kali pada 1974 dalam buku Francoise d'Eaubonne yang berjudul *Le Feminisme ou la Mort*. Dalam buku tersebut

dijelaskan adanya hubungan langsung antara opresi terhadap perempuan dan opresi terhadap alam. Menurut d'Eaubonne, pembebasan salah satu dari keduanya tidak dapat terjadi secara terpisah antara satu dengan yang lain (Tong, 2006: 366).

Pemikiran dan gerakan feminisme tersebut juga memengaruhi para intelektual, termasuk di kalangan Islam. Dengan menggunakan perspektif feminis, para intelektual Islam berupaya membongkar sumber-sumber permasalahan dalam ajaran Islam dan mempertanyakan penyebab munculnya dominasi laki-laki dalam penafsiran hadis dan Al-Qur'an (Fatma, 2007: 37). Melalui perspektif feminis berbagai macam pengetahuan normatif yang bias gender, tetapi dijadikan orientasi kehidupan beragama, khususnya yang menyangkut relasi gender dibongkar atau didekonstruksi dan dikembalikan kepada semangat Islam yang lebih menempatkan ideologi pembebasan perempuan dalam kerangka ideologi pembebasan harkat manusia (Dzuhayatin, 2002: 22). Dengan semangat tersebut muncullah berbagai gagasan dan kajian terhadap tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang dilakukan para intelektual muslim yang dikenal dengan sebutan feminis muslim (Rachman, 2002: 34; Nadjib, 2009; Dzuhayatin, 2002: 5). Beberapa karya mereka antara lain adalah *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis* (Ilyas, dkk., 2003), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Dzuhayatin, dkk. Ed, 2002), *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran* (Nurjanah-Ismail, 2003).

Munculnya gagasan dan kajian tersebut sesuai dengan semangat teologi feminisme Islam yang menjamin keberpihakan Islam terhadap integritas dan otoritas kemanusiaan perempuan yang terdistorsi oleh narasi-narasi besar wacana keislaman

klasik yang saat ini masih mendominasi proses sosialisasi dan pembelajaran keislaman kontemporer (Dzuhayatin, 2002: 22). Beberapa intelektual yang melakukan kajian Islam dengan perspektif feminis antara lain adalah Riffat Hassan (Pakistan), Fatima Mernissi (Mesir), Nawal Sadawi (Mesir), Amina Wadud Muhsin (Amerika), Zakiah Adam, dan Zainah Anwar (Malaysia), serta beberapa orang Indonesia antara lain Siti Chamamah Soeratno, Wardah Hafidz, Lies Marcoes-Natsir, Siti Nuhaini Dzuhayatin, Zakiah Darajat, Ratna Megawangi, Siti Musda Mulia, Masdar F. Mas'udi, Budhy Munawar Rachman, Nasaruddin Umar (Mojab, 2001: 128–129; Rachman, 2002: 34; Nadjib, 2009; Dzuhayatin, 2002: 5).

BAB III

PENELITIAN SASTRA FEMINIS



3.1 Konsep Dasar Penelitian Sastra Feminis

Penelitian sastra feminis merupakan salah satu model penelitian sastra yang menggunakan perspektif feminis. Dalam konteks ilmu sastra, penelitian sastra feminis atau sering disebut sebagai kritik sastra feminis merupakan penelitian yang mendasarkan pada pemikiran feminisme yang memfokuskan kajian pada adanya ketidakadilan dan subordinasi yang dialami perempuan, baik sebagai penulis maupun dalam karya-karya sastranya. Dalam konteks penelitian humaniora, penelitian sastra feminis adalah salah satu penelitian yang memfokuskan perhatian pada ketidakadilan dan subordinasi yang dialami perempuan yang terdapat dalam karya sastra maupun yang dialami oleh penulisnya sebagai seorang perempuan, dengan keinginan untuk mengubahnya. Kritik sastra feminis merupakan kritik yang bersifat revolusioner yang menumbangkan wacana yang dominan yang dibentuk oleh suara tradisional yang bersifat patriarkis (Ruthven, 1985: 6).